

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Adjie, Habib. 2009. *“Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia”*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bahiej, Ahmad. 2008. *Hukum Pidana*. Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2002. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2017. *Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga. Jakarta.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Kalsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. PT. Raja Grafindo Persada Bandung.

- Kansil, C.S.T. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Kartanegara, Satochid. 2001. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2010. *Proses Penanganan Acara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Matalatta, Andi. 1987. *Victimology Sebuah Bunga Rampai*. Pusat Sinar Harapan. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljatno. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- , 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 1998. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta. .
- Priyatno, Admaja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Cv. Utomo. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*. PT Eresco Jakarta. Bandung.
- , 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*. Mandar Maju. Bandung.

- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Saleh, Roeslan. 1983. “ Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dan pengertian dalam hukum pidana. Aksara Baru. Jakarta.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acura Pidana Indonesia datum Sirkas Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemitro, Ronny H. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soerodibroto, Soenarto. 2009. *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahakamah Agung dan Hoge Raad*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soesilo, R. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Politeia. Bogor.
- Soetarna, Hendar. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang.
- Tedjosaputro, Liliana. 1991. *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*. CV. Agung. Semarang.
- , 2003. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bigrat Publishing. Yogyakarta.
- Wibowo, Kurniawan Tri dan Warih Anjari. 2022. *Hukum Pidana Materil*. Kencana. Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Jurnal dan Sumber Lainnya**

Bassang, Tommy J.. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015.

Haedar, Fahri. *Kasus Jual Beli Villa Bali. Korban: PK Bertentangan dengan Fakta Persidangan*. <https://www.telusur.co.id/detail/kasus-jual-beli-villa-bali-korban-pk-bertentangan-dengan-fakta-persidangan>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

Izarman. *Inilah Perjalanan Kasus Pemalsuan Surat Jual Beli Villa Bali Rich*. <https://www.patrolipost.com/inilah-perjalanan-kasus-pemalsuan-surat-jual-beli-villa-bali-rich/>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

Kartika, Shanti Dwi. “*Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali. Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum*”. Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian. Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Vol. VI. No. 06/II/P3DI/Maret/2014.

Kurniawan, Achmad Arif. 2016. “*Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Karyawan Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat*”. Jurnal Hukum Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan. X/IV/2016.

Lessil, Marcellino. Elsa Rina Maya Toule. dan Denny Latumaerissa. *Pemalsuan Bukti CI Rekapon Pada Proses Pemilihan Legislatif*. Tatchi Jurnal Ilmu Hukum Vol 1. No 11 (2022).

N.E. Algra. 1983. *Kamus istilah hukum Fockema Andreae :Belanda - Indonesia* diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah. Binacipta. Jakarta.

Susanto, Eko Adi. Gunarto. dan Maryanto. *Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat ( 2) KUHP*. Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.